



**KEPUTUSAN SEKRETARIS PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS IB**

**NOMOR : W13-U5/1/SK.SEK/KU.01// 2023**

**T E N T A N G**

**PENUNJUKAN PENGELOLA PNB (BENDAHARA PENERIMA)**

**DIPA BADAN URUSAN ADMINISTRASI (01) DAN DIPA BADAN PERADILAN UMUM (03)**

**PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS IB**

**TAHUN ANGGARAN 2023**

**SEKRETARIS PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS IB**

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan anggaran Tahun 2023 dan untuk mendukung berbagai sasaran dan pelaksanaan bidang keuangan serta untuk mendukung program reformasi birokrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;
  - b. Bahwa dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Pengadilan Negeri Bantul Kelas IB dipandang perlu menunjuk Bendahara Penerima;
  - c. Bahwa dengan pertimbangan point a dan b dikeluarkan Surat Keputusan ini;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor : 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 5178);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penerimaan Jumlah, Pembayaran, dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak yang terhitung;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Bukan Pajak yang Berlaku Pada Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;
  8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  10. Peraturan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor : PER-55/PB/2012 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementrian Negara/ Lembaga.
  12. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Dan Kesekretariatan Peradilan
  13. Keputusan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 55/PA/SK/XII/2022 Tanggal 1 Desember 2022 Tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang Satuan Kerja Dilingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya;
  14. DIPA Badan Urusan Administrasi Nomor : SP DIPA-005.01.2.400172/2023 Tanggal 30 November 2022;

15. DIPA Badan Peradilan Umum Nomor : SP DIPA-005.03.2.400173/2023 Tanggal 30 November 2022.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Keputusan Sekretaris Pengadilan Negeri Bantul Kelas IB tentang Penunjukan Pengelola PNB (Bendahara Penerima) DIPA Badan Urusan Administrasi (01) DAN DIPA Badan Peradilan Umum (03) Pengadilan Negeri Bantul Kelas IB Tahun Anggaran 2023
- KESATU** : Menunjuk dan mengangkat pegawai yang namanya tersebut pada lajur 2 dalam tugas sebagaimana tersebut pada lajur 5 Daftar Lampiran Keputusan ini untuk DIPA Unit Organisasi Badan Urusan Administrasi (01) dan DIPA Unit Organisasi Badan Peradilan Umum (03) Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tersebut dalam Lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA** : Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud diktum kesatu mempunyai tugas, wewenang dan tanggung jawab :
- a. melaksanakan tugas kebendaharaan atas uang/surat berharga yang berada dalam pengelolaannya, meliputi: menerima, menyimpan, menatausahakan, dan membukukan uang/surat berharga dalam pengelolaannya;
  - b. melakukan pemotongan/pemungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan menyetorkan pemotongan/pemungutan PNBPN tersebut ke kas Negara;
  - c. menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bendahara kepada Kepala KPPN selaku Kuasa BUN.
  - d. melakukan tugas dan kewenangan perbendaharaan lainnya sebagaimana diatur dalam ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.  
Melaksanakan tindak lanjut dari hasil laporan kepada atasan langsung;  
Bertanggung Jawab atas tugas dan kewajiban masing-masing;  
Membuat evaluasi dari pelaksanaan tugas dan kewajiban masing-masing;  
Melaksanakan tugas lain sesuai perundang-undangan yang berlaku
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul karena Surat Keputusan ini dibebankan berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Negeri Bantul Kelas IB Tahun Anggaran 2023;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada sejak tanggal 02 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Bantul  
Pada Tanggal : 02 Januari 2023

SEKRETARIS

  
YUYUN FITHRIYAH, S.E., Ak.

Tembusan :

1. Ketua Pengadilan Negeri Bantul Kelas IB;
2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Yogyakarta;
3. Bendahara Pengeluaran Pengadilan Negeri Bantul Kelas IB;
4. Yang Bersangkutan;

Lampiran KEPUTUSAN SEKRETARIS PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS IB  
NOMOR : W13-U5/30/SK.SEK/KU.01/I/ 2023  
Tanggal : 02 Januari 2023

PENUNJUKAN PENGELOLA PNBP (BENDAHARA PENERIMA)  
DIPA BADAN URUSAN ADMINISTRASI (01) DAN DIPA BADAN PERADILAN UMUM (03)  
PADA PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS IB  
TAHUN ANGGARAN 2023

NO	NAMA / NIP	PANGKAT/ GOL	JABATAN TIM PENGELOLA KEUANGAN
1	2	4	5
1.	SISWATI MARIANA SIHOMBING, A.Md. NIP. 19870125 200912 2 002	Penata Muda Tk. I (III/b)	Pengelola PNBP (Bendahara Penerima)



Bantul, 02 Januari 2023  
SEKRETARIS,

YUYUN FITHRIYAH, S.E., Ak.